

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana tata kelola global anti-doping mengatur kepatuhan dalam sepak bola serta bagaimana implementasinya tercermin dalam penanganan kasus Mykhailo Mudryk. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola global anti-doping membentuk kerangka regulatif dan prosedural yang memengaruhi tindakan FIFA dan *The Football Association* (FA). Pengaruh itu tidak hanya terlihat dari keberadaan *World Anti-Doping Code* (WADC), tetapi juga dari *International Standards*, *FIFA Anti-Doping Regulations*, dan *FA Anti-Doping Regulations* yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan anti-doping.

Dengan kerangka *global governance* dan *sport governance* yang mengikuti Jedlicka (2017), tata kelola anti-doping dibaca melalui empat dimensi. Dimensi pertama adalah struktur otoritas dan pembagian peran antara WADA, FIFA, FA, *Independent Regulatory Commission*, dan CAS. Dimensi kedua adalah aturan dan standar, yang diwujudkan lewat WADC, *International Standards* termasuk *International Standard for Results Management* (ISRM), *FIFA Anti-Doping Regulations*, dan *FA Anti-Doping Regulations*. Dimensi ketiga adalah prosedur, yang terlihat dari rangkaian *doping control*, *results management*, *notification*, *provisional suspension*, *charge*, *hearing*, penetapan konsekuensi, banding, dan *case resolution*. Dimensi keempat adalah pengawasan, banding, dan akuntabilitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi tidak berlangsung lewat hubungan hierarkis tunggal. WADA membentuk standar dan memantau kepatuhan, FIFA menerjemahkan standar itu ke dalam tata kelola sepak bola internasional, sedangkan FA menjalankan fungsi implementatif di yurisdiksi

sepak bola Inggris. Dalam kasus Mudryk, FA menjalankan *results management*, memberikan *notification* dan *provisional suspension*, serta mengajukan *charge*. Pemeriksaan tingkat pertama dilakukan melalui *hearing* di depan *Independent Regulatory Commission*, sedangkan CAS tersedia sebagai forum banding. Pembagian ini menunjukkan bahwa tata kelola anti-doping bekerja lewat distribusi kewenangan antarlembaga yang punya fungsi berbeda tetapi berada dalam kerangka aturan dan prosedur yang sama.

Dari perspektif teori kepatuhan, penelitian menemukan bahwa kepatuhan formal FIFA dan FA dapat dinilai relatif kuat. Pada tingkat FIFA, kepatuhan formal terlihat dari pengintegrasian ketentuan WADC ke dalam FIFA *Anti-Doping Regulations*. Pada tingkat FA, kepatuhan formal terlihat lebih konkret lewat penggunaan rangkaian prosedur yang tersedia dalam menangani kasus Mudryk, mulai dari *notification*, *provisional suspension*, *charge*, *hearing*, mekanisme banding, hingga penyelesaian perkara lewat *Case Resolution Agreement*. Penyelesaian akhir yang memakai Article 10.8.2 WADC dan Regulation 90 FA *Anti-Doping Regulations* dengan persetujuan WADA juga menunjukkan bahwa perubahan konsekuensi terhadap Mudryk dilakukan lewat mekanisme yang memang tersedia, bukan lewat prosedur di luar kerangka anti-doping.

Namun kepatuhan substantif menunjukkan hasil yang lebih bersyarat. Kasus Mudryk memperlihatkan adanya perlindungan hak prosedural lewat pemberitahuan, kesempatan mengikuti *hearing*, pemeriksaan oleh *Independent Regulatory Commission*, dan akses banding ke CAS. Akan tetapi penelitian menemukan persoalan pada aspek *timeliness*. Mudryk menerima *notification* pada 4 Desember 2024, sedangkan *hearing* tingkat pertama baru dimulai pada 7 Januari 2026. Prosesnya berlangsung lebih dari satu tahun dan melebihi *guideline* sekitar enam bulan dalam ISRM.

Terlampauinya *guideline* enam bulan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa FA melakukan *non-compliance*, karena ISRM tidak menempatkan enam bulan sebagai batas absolut dan memberi ruang bagi kasus

kompleks atau keadaan lain yang membuat proses lebih panjang. Namun dokumen resmi yang tersedia tidak menjelaskan terperinci seluruh kegiatan dan alasan yang menyebabkan interval panjang antara *notification*, *charge*, dan *hearing*. Karena itu penelitian tidak bisa memastikan apakah seluruh durasi itu dapat dibenarkan menurut kondisi yang diperbolehkan ISRM. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara terpenuhinya tahapan prosedural dan kualitas implementasi dari sisi ketepatan waktu dan transparansi.

Pada aspek *due process*, hak prosedural Mudryk tetap tersedia secara institusional, tetapi pelaksanaannya perlu dilihat dalam kaitannya dengan *reasonable time*. Lamanya masa *provisional suspension* sebelum keputusan tingkat pertama menunjukkan bahwa keadilan prosedural tidak hanya berkaitan dengan adanya *hearing* atau banding, tetapi juga dengan ketepatan waktu memperoleh keputusan. Oleh karena itu penelitian ini tidak menilai kepatuhan substantif FIFA dan FA sebagai kepatuhan penuh maupun ketidakpatuhan penuh, melainkan sebagai kepatuhan substantif yang bersifat bersyarat (*qualified compliance*).

Perkembangan *Technical Document* TD2027MRL dan penyelesaian perkara lewat Article 10.8.2 WADC juga menunjukkan bahwa tata kelola anti-doping mampu beradaptasi terhadap perkembangan standar ilmiah. Meskipun perubahan TD2027MRL tidak berlaku retroaktif dan tidak menghapus ADRV yang sudah terjadi, mekanisme *Case Resolution Agreement* memungkinkan perkembangan itu dipertimbangkan dalam penentuan konsekuensi akhir tanpa meninggalkan struktur aturan yang berlaku. Fleksibilitas ini tidak selalu menandakan lemahnya aturan, tetapi dapat menjadi bagian dari mekanisme koreksi selama dilakukan lewat prosedur yang tersedia. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi aturan dalam tata kelola global anti-doping lebih kuat daripada harmonisasi kualitas implementasinya. WADC dan aturan turunannya mampu menciptakan kerangka regulasi dan prosedur yang relatif seragam, tetapi implementasi konkret tetap bergantung pada aktor yang memegang kewenangan pada tiap tingkat. Kasus

Mykhailo Mudryk menunjukkan bahwa kepatuhan tidak cukup dinilai dari keberadaan atau penggunaan prosedur formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan *timeliness*, *due process*, transparansi, serta kemampuan sistem menyesuaikan diri dengan perkembangan yang relevan tanpa keluar dari kerangka aturan yang berlaku.

4.2 Saran

Penelitian ini punya keterbatasan karena memakai pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dan berfokus pada satu kasus, yaitu kasus Mykhailo Mudryk. Dokumen resmi memungkinkan penelitian mengidentifikasi struktur regulasi, pembagian kewenangan, kronologi, dan prosedur yang dipakai dalam penanganan perkara. Namun dokumen yang tersedia tidak menjelaskan secara lengkap seluruh proses internal antara *notification*, *charge*, dan *hearing*. Keterbatasan ini membuat penelitian tidak bisa menentukan secara pasti faktor yang menyebabkan proses tingkat pertama melebihi *guideline timeliness* dalam ISRM.

Berdasarkan keterbatasan itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih khusus *timeliness* dalam proses *results management* anti-doping. Penelitian bisa membandingkan durasi antara *notification*, *charge*, dan *hearing* pada beberapa kasus, serta mengidentifikasi kondisi yang membuat penyelesaian perkara berada di dalam atau melampaui *guideline* ISRM. Pendekatan komparatif dapat membantu melihat apakah kasus Mudryk bersifat khusus atau bagian dari pola yang lebih luas dalam implementasi kebijakan anti-doping.

Penelitian selanjutnya juga dapat memakai desain perbandingan antar kasus atau antar asosiasi sepak bola nasional. Kasus Mudryk dapat dibandingkan dengan kasus anti-doping lain dalam sepak bola profesional yang diproses oleh organisasi atau yurisdiksi berbeda. Perbandingan itu dapat menguji apakah keberadaan WADC benar-benar menghasilkan keseragaman implementasi, atau masih ada variasi dalam *results management*, *hearing*, penetapan sanksi, dan

perlindungan hak atlet. Pendekatan ini juga dapat memperkuat analisis tentang kesenjangan antara harmonisasi regulasi dan harmonisasi implementasi.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat memberi perhatian lebih besar pada *due process* dan *procedural fairness* dalam sistem anti-doping. Penelitian ini menemukan bahwa hak *hearing* dan banding belum cukup untuk menilai kualitas proses bila tidak disertai penyelesaian dalam waktu yang wajar. Karena itu penelitian selanjutnya dapat secara khusus mengkaji hubungan antara *provisional suspension*, *timeliness*, akses terhadap bantuan hukum, independensi badan adjudikasi, dan perlindungan hak atlet selama proses anti-doping.

Pendekatan penelitian juga dapat dikembangkan dengan wawancara atau data primer dari pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan anti-doping, seperti asosiasi olahraga, organisasi anti-doping, praktisi hukum olahraga, atau pihak yang memahami proses *results management*. Wawancara dapat membantu menjelaskan hal yang tidak tersedia dalam dokumen resmi, terutama pertimbangan administratif, koordinasi antar aktor, penyebab keterlambatan, dan pengambilan keputusan pada tahap internal.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam kajian tentang transparansi dalam penanganan perkara anti-doping. Kasus Mudryk menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan utama dapat diketahui dari dokumen resmi, tetapi alasan di balik interval waktu tertentu dan seluruh pertimbangan penyelesaian akhir tidak selalu dipublikasikan secara terperinci. Penelitian lebih lanjut dapat menilai seberapa jauh keterbukaan informasi dibutuhkan untuk menjaga legitimasi sistem tanpa mengabaikan kebutuhan kerahasiaan dalam proses hukum dan perlindungan atlet. Jedlicka (2017) juga mencatat bahwa data tentang organisasi olahraga internasional sulit diperoleh dan belum terkumpul secara terpadu, sehingga komitmen yang lebih luas pada pengumpulan dan berbagi data dapat membuka jalan bagi studi berskala lebih besar.

Terakhir, penelitian mendatang dapat memperluas penerapan kerangka *global governance* dan *sport governance* dengan membandingkan pembagian

otoritas dan pelaksanaannya pada beberapa cabang olahraga atau beberapa negara. Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan apakah perbedaan kualitas implementasi merupakan persoalan khusus sepak bola atau karakter yang lebih luas dari tata kelola anti-doping. Perspektif lain, misalnya konstruktivisme, juga dapat dipakai untuk melihat bagaimana negara dan organisasi olahraga menginternalisasi aturan anti-doping dari waktu ke waktu (Jedlicka, 2017). Dengan begitu, penelitian selanjutnya dapat memberi gambaran yang lebih lengkap tentang sejauh mana harmonisasi global lewat WADC benar-benar menghasilkan praktik anti-doping yang konsisten, adil, transparan, dan tepat waktu.